

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sabon, Max Boli, 2009, Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta
- Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2004, Raja Grafindo Persada
- Damian, Eddy, 1991, Kapita Selekta Hukum Internasional, Bandung, Alumni
- Hadi, Sutrisno, 1993, Metodologi Research Jilid 1, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Hukum Laut Internasional, Bandung: Bina Cipta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung
- Manulang, Fernando, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung
- Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional, "Pengertian, Peranan Dan Fungsi. Dalam Era Dinamika Global", Bandung, PT. Alumni
- Manan, Bagir, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, AAI, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, Teori Hukum, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Universitas
- Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum.
- Purwaka, Tommy, Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3
- Sabon, Max Boli, 2009, Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Soeprapto, Maria, 2013, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kasinius, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Suryabrata, Sumadi, 2004, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo
- Umar, Huseyn, 2015, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, PT. Fikahati Aneska, Jakarta
- Umar, 2001, Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia, Buku I, Cetakan I, Jakarta

Perundang-undangan:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang
- Surat Keputusan Menteri Nomor Km 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
- UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal:

- Amin, Muhammad, Jurnal Fundamental Vol. 01 No. 02, Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia
- Aprilianto, Ricky, 2014, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No.4 “Implementasi Asas Cabotage Dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia”, Universitas Brawijaya
- Asshiddiqie, Jimly, 1999, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI)
- De Leon, 1992, Cabotage in Air Transport Regulation, Dordrecht: Martinus Nijhoff
- Debi, Vini, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Cabotage dalam Kasus Penggunaan Kapal Berbendera Asing dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri dalam Era Perdagangan Bebas ASEAN Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, diakses pada tanggal 27 November 2021
- Hodgson, Toward a North American Cabotage Regime: A Canadian Perspective, Canadian Journal of Transportation, Vol. 1, No. 1, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar, dalam Muhammad Iqbal Asnawi, 2012, Implikasi Pemberlakuan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Indonesia Pada Perdagangan Bebas Dalam Kerangka WTO, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Mamudji, Sri, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Miles, 2014, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, USA: Sage Publications, terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Rizki Aprilianto, dkk, 2014, “Implementasi Asas Cabotage Dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No.4. Universitas Brawijaya
- Rosyid Mohammad Daniel, Setyawan Dony, “*Kekuatan Struktur Kapal*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000,.
- Santoso, Iman, 2018, Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negaradalam Sudut Pandang Keimigrasian, Binamulia Hukum Vol. 7, No. 1
- Siregar, Asnawi, 2012, “Cabotage Principle Pada Regulasi Jasa Angkutan dalam Perairan Indonesia dari Prespektif Sistem Perdagangan Multilateral WTO/GATS
- Sjawie, Hasbullah, 1999, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 29
- Syamsudin, 2007, Urgensi dan Kendala Penerapan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Domestik Indonesia Di Era Perdagangan Bebas, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 9, Nomor 1

Vini Adelin Ifana Debi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Cabotage dalam Kasus Penggunaan Kapal Berbendera Asing dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri dalam Era Perdagangan Bebas ASEAN Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-UndanganTerkait, diakses tanggal 27 November 2021.

Internet:

Farida Puspasari, “Penegakan Hukum di Wilayah Laut, <http://www.scribd.com> diakses tanggal 26 Desember 2021

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 27 November 2021

Milis Migas, “Jumlah Awak Kapal Crew Boat” <http://www.migas-indonesia.com/index.php?module=article&act=view/&id=4452>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021

